

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dengan menggunakan teknik Logaritma Natural (LN), berikut adalah beberapa temuan yang dapat diperoleh dari pengujian keterkaitan pendapatan daerah dengan tagihan listrik di 27 kabupaten dan kota sampel yang berada di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2018 sampai 2022:

1. Pendapatan Asli Daerah mengidentifikasi, pada tingkat individu, tren positif dan cukup besar yang terkait dengan penggunaan modal belanja di provinsi Jawa Barat selama tahun 2018–2022. Tren ini akan berlangsung selama periode waktu 2018–2022. Diperkirakan pertumbuhan ini akan terus berlanjut untuk beberapa tahun mendatang. Konsekuensinya, tolok ukur Belanja Modal juga akan sangat terpengaruh oleh kinerja tolok ukur Pendapatan Asli Daerah.
2. Undang-Undang Reorganisasi Pemerintah Daerah (Dana Alokasi Umum) gagal memberikan manfaat besar dan menguntungkan bagi moda belanja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama tahun 2018–2022. Di kawasan utama, Dana Alokasi tidak terlalu luas dan pada jam sibuk, secara bertahap diubah menjadi Belanja Modal.
3. Dana Alokasi Khusus akan memberikan rekomendasi yang baik tentang jumlah uang yang akan dibelanjakan di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat antara tahun 2018 dan 2022. Hal ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan variabilitas individual yang ada. Dengan kata lain, tujuan Dana Alokasi Khusus adalah mengubah cara pandang masyarakat terhadap Belanja Modal.
4. Variabel Dana Bagi Hasil individu mencerminkan perubahan yang positif dan signifikan secara statistik pada jumlah total pinjaman yang terjadi di Kabupaten/Kota yang terkena dampak di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018 hingga 2022. Perubahan ini akan terjadi antara tahun 2018 dan 2022. Tujuan mendasar dari Dana Bagi Hasil adalah untuk mempengaruhi perubahan perilaku yang positif pada masyarakat umum terkait Belanja Modal.
5. Pemerintah daerah dan daya nasional Jawa Barat mengalami kenaikan anggaran secara kolektif sebagai konsekuensi dari pengenalan sumber-sumber pendapatan baru seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana

Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Dalam hal ini, diklaim bahwa setiap perubahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, negara bagian, atau lokal saat mengumpulkan gaji mereka dari satu tahun ke tahun berikutnya akan menghasilkan kenaikan jumlah uang yang tersedia untuk membayar gaji mereka. Ini berlaku untuk semua tingkat pemerintahan, termasuk tingkat pusat, negara bagian, dan kota.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah di provinsi sebaiknya mengoptimalkan peningkatan layanan untuk memaksimalkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan mereka pada pemerintah pusat, dan untuk memaksimalkan manfaat dari pengalaman dan keahlian mereka sendiri sehingga daerah konstituen mereka dapat berkembang secara maksimal dalam hal infrastruktur. dan layanan publik.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini memberikan perspektif segar dan informasi baru kepada pembaca tentang faktor-faktor yang berdampak pada aliran keuntungan moneter (Belanja Modal). Oleh karena itu, ada harapan bahwa penelitian ini akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi lapangan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Para peneliti yang tertarik untuk menggunakan penelitian ini sebagai titik awal sangat disarankan untuk mengembangkannya dengan menambahkan faktor-faktor independen tambahan seperti SILPA dan pertumbuhan ekonomi, yang keduanya berpotensi mengubah pengeluaran moneter. Meskipun penelitian ini dilakukan di provinsi Jawa Barat, kemungkinan penelitian selanjutnya akan memperluas cakupannya untuk mencakup seluruh Indonesia. Selain itu, periode penelitian dapat diperpanjang hingga lebih dari lima tahun untuk memberikan gambaran yang akurat tentang status sistem moneter Indonesia.